

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK
KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

SKRIPSI

OLEH:

HOTBER ERIX KANTONI SIMBOLON

198510041



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK
KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:

**HOTBER ERIX KANTONI SIMBOLON
198510041**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Oleh
Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten
Humbang Hasundutan
NAMA : Hotber Erix Kantoni Simbolon
NPM : 198510041
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.L.P Marijma Deliana, SAB, MAB

Mengetahui :

Fakultas ISIPOL

Dr. Nurul Julianna Hasibuan, M.Si

Ilmu Pemerintahan

Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotber Erix Kantoni Simbolon
NPM : 198510041
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

beserta perangkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

Vera Menyatakan

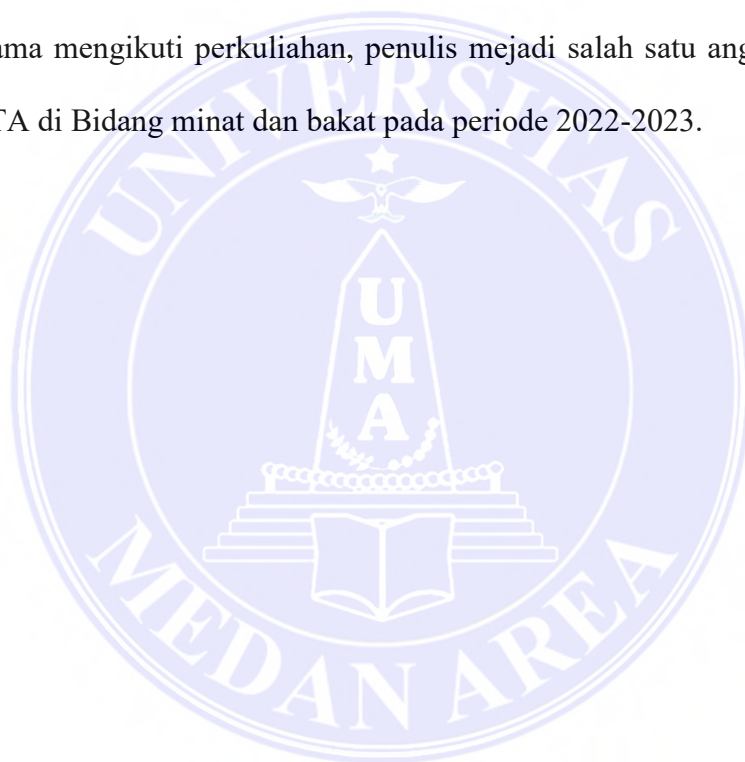


(Hotber Erix Kantoni Simbolon)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tukka Toruan pada Tanggal 26 Juni 2000 dari Ayah Englizen Simbolon dan Ibu Nurlinca Sibagariang. Penulis merupakan putra ke dua dari empat bersaudara, Tahun 2018 penulis lulus dari SMA NEGERI 1 PAKKAT dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis mejadi salah satu anggota organisasi IKAMITA di Bidang minat dan bakat pada periode 2022-2023.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Desa Tukka Dolok menjadi salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Pakkat, desa ini terdiri dari empat dusun antara lain, dusun huta torop, dusun soripada huta ginjang, dusun sitahal-tahal, dan dusun sarumarnaek gomburan dengan luas wilayah +/-2300Ha. Dalam penelitian ini bahwa penerapan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat menggunakan teori Edward III komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan, hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa tukka dolok sudah cukup maksimal dalam penerapannya merujuk pada kebijakan pemerintah desa dengan melihat bagaimana komunikasi pemerintah desa terhadap masyarakat dan menunjuk sumber daya manusia atau aparatur desa sebagai agen penyalur bantuan pangan non tunai sudah memiliki karakteristik dan sopan santun yang baik terutama dalam penyaluran bantuan pangan non tunai dengan birokrasi aparatur desa yang cukup relevan.

Kata Kunci : implementasi, desa Tukka Dolok, BPNT

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE BY THE GOVERNMENT IN TUKKA DOLOK VILLAGE, PAKKAT SUB-DISTRICT, HUMBANG HASUNDUTAN DISTRICT

Tukka Dolok Village is one of several villages in Pakkat District, this village consists of four hamlets, namely, Huta Torop Hamlet, Soripada Huta Ginjang Hamlet, Sitahal-Tahal Hamlet, and Sarumarnaek Gomburan Hamlet with an area of +/-2300Ha . In this study, the implementation of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) policies was seen using Edward III's theory of communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. This research uses a qualitative type methodology that uses interview techniques, observation, and also documentation. As a reinforcement, this study also consisted of key informants, main informants and additional informants. The purpose of this research was to find out the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Distribution Policy in Tukka Dolok Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan Regency, the results of this study were the implementation of non-cash food assistance policies. carried out by the Tukka Dolok village government is quite maximal in its application referring to village government policies by looking at how the village government communicates with the community and appoints human resources or village apparatus as agents for distributing non-cash food assistance already has good characteristics and manners, especially in distribution of non-cash food assistance with village apparatus bureaucracy which is quite relevant.

Keywords:*Implementation, Tukka Dolok Village, BPNT*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa atas segala karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan strata satu pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs.M.Erwin Siregar, MAB selaku ketua yayasan Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos. M.IP selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Marlina Deliana,S.AB, M.AB selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP, selaku sekertaris yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
9. Orang tua dan Kakak saya yang telah banyak memberikan dukungan moral dan motivasi kepada penulis atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

10. Terimakasih kepada teman seperjuangan saya, teman satu kos saya Rizki, Putra, Mustopo, Aldo, Alfin, yang telah banyak memberikan motivasi, serta dukungan sehingga terselesainya skripsi saya ini

Penulis juga menyadari bahwa tugas pembuatan skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.



Penulis



(Hotber Erix Kantoni Simbolon)

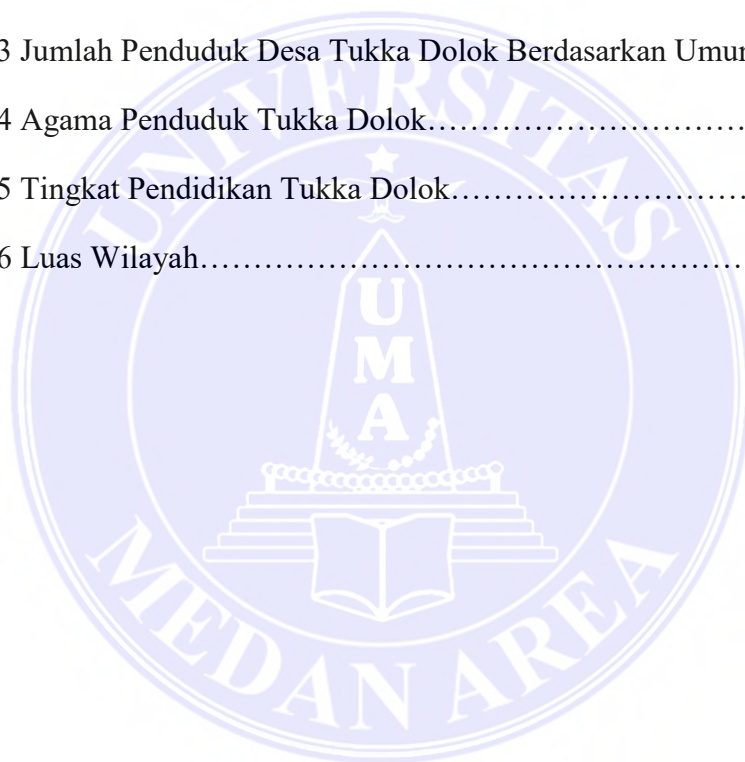
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Implementasi.....	9
2.2 Kebijakan.....	13
2.3 Bantuan Pangan Non Tunai.....	15
2.4 Pemerintah Desa.....	17
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.6 Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Informan Penelitian.....	23
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Sumber Data.....	24

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
3.7 Lokasi dan jadwal Penelitian.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat.....	29
4.1.1 Kondisi Demografis.....	31
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Desa Tukka Dolok.....	34
4.1.3 Pemerintah Desa Tukka Dolok.....	36
4.1.4 Susunan Organisasi Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tukka Dolok.....	38
4.1.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Tukka Dolok.....	39
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.3 Pembahasan Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tukka Dolok Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	45
4.3.1 Indikator Komunikasi.....	45
4.3.2 Indikator Sumber Daya.....	48
4.3.3 Indikator Disposisi.....	50
4.3.4 Indikator Struktur Birokrasi.....	52
4.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI.....	60
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA.....	61
LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVASI.....	66
LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA.....	67
LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN.....	72
LAMPIRAN 6 SURAT RISET LAPANGAN.....	74
LAMPIRAN 7 SURAT BALASAN KANTOR DESA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerima BNPT Di Desa Tukka Tahun 2021.....	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Jadwal Penyelesaian Skripsi.....	28
Tabel 4.1 Batas Wilayah.....	29
Tabel 4.2 Potensi Sarana dan Prasarana Desa Tukka Dolok.....	31
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tukka Dolok Berdasarkan Umur.....	32
Tabel 4.4 Agama Penduduk Tukka Dolok.....	33
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Tukka Dolok.....	33
Tabel 4.6 Luas Wilayah.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	21
Gambar 4.1 Denah Desa Tukka Dolok.....	30
Gambar 4.2 Kantor Desa Tukka Dolok.....	36
Gambar 4.3.1 Komunikasi Dengan Masyarakat.....	47
Gambar 4.3.2 Salah Satu Sumber Daya.....	49
Gambar 4.5 Daftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Desa Tukka Dolok Tahun 2021.....	55



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk Indonesia, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multi dimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu perspektif yang baru atau berbeda untuk melihat, mepnafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia. Kemiskinan yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik dan budaya. Kemiskinan dalam segala dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktural dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang, (syaiful arif, 2000: 289).

Kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan, pendapatan konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai

mereka yang tidak memiliki 2 pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.

Sulastomo, (2011:14) Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling besar yang dihadapi setiap Negara termasuk Indonesia. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. BPNT merupakan program penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi oleh pemerintah yang diberikan

melalui kupon elektronik (*e-voucher*). *E-voucher* ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Masyarakat hanya bisa memilih dua dari bahan pangan tersebut.

UUD 1945 pasal 34 ayat 2 pasal ini mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah memberi rehabilitasi sosial jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta tidak mampu. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bantuan pangan non tunai atau BPNT adalah salah satu bentuk kebijakan dari program bantuan sosial pangan yang dikururkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dengan melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli pangan pada pedagang pokok (*e-warong*) yang bekerja sama dengan bank. Kebijakan BPNT ini telah diatur PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Jalannya proses penyaluran BPNT sendiri juga dinyatakan dalam PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 pasal 21 ayat (4) yang berbunyi bahwa “proses penyaluran BPNT dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan”. Adapun beberapa landasan hukum yang mendasari atas pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT yaitu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Kebijakan Penyaluran BPNT yang mengacu pada PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017 menyatakan bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial”. BPNT merupakan salah satu bentuk bantuan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat yang berekonomi rendah serta untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga untuk menjalankan maksud tersebut, pemerintah dan negara wajib memberikan bantuan, kepastian perlindungan dan kesejahteraan rakyat dalam bentuk badan penyelenggaraan bantuan pangan maupun sosial bagi masyarakat. BPNT dikelola Kementerian Sosial. Hal tersebut dinyatakan dalam Rangkuman Informasi Program BPNT 2019, bahwa BPNT dikelola oleh Kementerian Sosial, di bawah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM).

Tujuan Program BPNT selain meningkatkan ketepatan sasaran masyarakat penerima yaitu, memberikan beberapa pilihan bisa telur, beras, atau bahkan bisa memilih keduanya sesuai dengan ketentuan e-voucher, serta memberikan

akses kesejahteraan pada masyarakat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Adapun penyaluran BPNT mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Tukka dolok dimulai dari tahun 2019 sampai 2022 maka saya mendapat data penerima bantuan pangan non tunai pada tahun 2021 yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah penerima BPNT di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	Januari	90 KPM
2	Februari	90 KPM
3	Maret	76 KPM
4	April	76 KPM
5	Mei	75 KPM
6	Juni	75 KPM
7	Juli	77 KPM
8	Agustus	77 KPM
9	September	86 KPM
10	Oktober	86 KPM
11	November	77 KPM
12	Desember	77 KPM

Sumber : *Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan*

Rekapitulasi jumlah penerima BPNT yang telah saya paparkan di atas merupakan data kemiskinan di desa Tukka Dolok Yang merupakan Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai merupakan reformasi dari program subsidi beras sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program serta untuk mendorong inklusi keuangan.

Tujuan dari penyaluran bantuan pangan non tunai ini agar memenuhi 6T yaitu: tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk mewujudkan 6T pemerintah yang semula memberikan bantuan langsung tunai berubah menjadi bantuan pangan non tunai yang dibelikan untuk bahan pangan seperti : telur, beras, sayur-sayuran, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Alfabeta, 74-75: 2013).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin (1,32 ribu jiwa) dibanding tahun 2019 yaitu dari 16,60 ribu jiwa (8,75 persen) menjadi 17,92 ribu jiwa (9,36 persen). Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan dari 0,96 pada tahun 2019 menjadi 1,29 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2020 semakin jauh dari garis kemiskinan jika dibandingkan pada tahun 2019. Dilihat dari sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan dari 0,21 pada tahun 2019 menjadi 0,30 pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019.

Tidak tepatnya sasaran pemberian bantuan BPNT kepada masyarakat yang kurang mampu serta kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa Tukka Dolok terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) menjadi fokus permasalahan terhadap penelitian ini sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dideskripsikan pada hasil akhir penelitian ini akhirnya dengan penegasan serta pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat judul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tidak tepat sarannya pemberian bantuan BPNT kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Kurangnya informasi yang diberikan pemerintah desa tukka dolok terhadap penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yaitu:

1. Bagaimanakah implentasi kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program BPNT di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis, Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam kajian untuk mengetahui proses implementasi kebijakan publik, terutama mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Dari Aspek Praktis bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas mengenai kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai yang diberlakukan agar masyarakat dapat berkontribusi dengan baik agar menjadi masyarakat yang peduli dengan dan taat dengan aturan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2008 : 5) kebijakan public adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.” Kemudian menurut Carl Friedrich dalam Wibowo (2011 : 5) “kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan *Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA, 1983.*

2.1.1 Teori – Teori Implementasi

a. Model Implementasi oleh George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemmentasi suatu kebijakan, yaitu : 1.Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi (sikap pelaksana) 4. Struktur birokrasi

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan

kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension*)

and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan”. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

4. Struktur birokrasi

Merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Gunanya struktur ini untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam kebijakan sosial. Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, dia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu

kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek atau dimensi yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan teknis operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana serta sumber daya lainnya disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan Publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Easton memberikan pengertian kebijakan Publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Menurut Dunn (2000 :132) mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah “pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Lain halnya dengan Dunn, Dye dalam Wibowo (2011 : 2) mendefinisikan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. James E. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

2.3 Bantuan Pangan Non Tunai

A. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/ E-Warong. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan Pangan. Dalam proses penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

B. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1) Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai

- a) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Pangan.
- b) Meningkatkan ketepatan sarana dan waktu penerimaan bantuan pasangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- c) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.

2) Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- d) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

C. Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannya rendah.
- 2) Tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Rumah dengan kondisi tidak layak huni.

2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah, Soemantri (1976 : 17), sehingga secara etimologi dapat diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawaban atau aparatur susunan politik, Yamin (1982: 112).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten

Syarat –syarat terbentuknya desa adalah:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamsil6 , pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

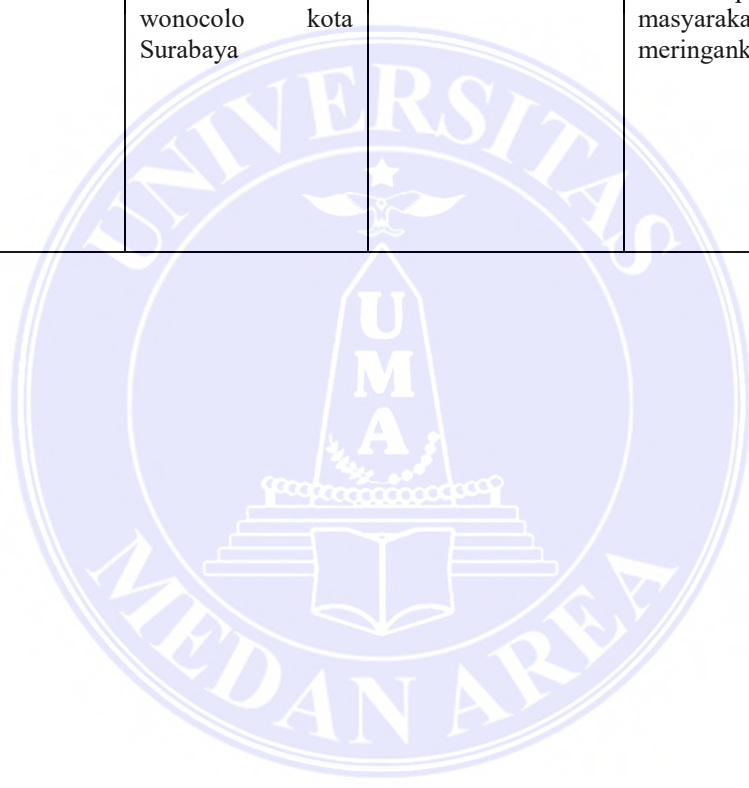
Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulisan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

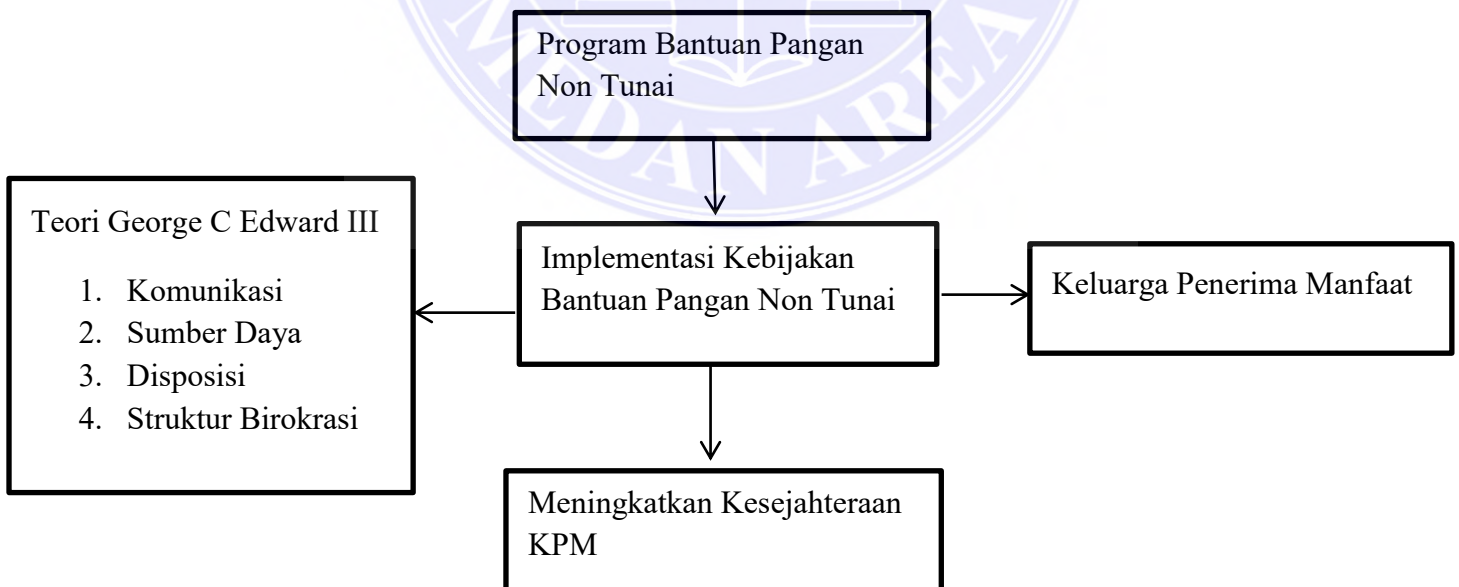
No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
1	Edo Yudianto	Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kanigaran Probolinggo	2019	faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat
2	Ahda Sulukin Nisa	Analisis program bantuan pangan non tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam	2019	Berdasarkan hasil Analisis menunjukkan bahwa masih cukup banyak keluarga miskin yang tidak menerima bantuan pangan non tunai (BPNT).
3	Ika Surya Kharismawati	Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui Ewarong dikelurahan sidosermo kecamatan wonocolo kota Surabaya	2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variablel implementasi Berpengaruh signifikan terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial Dalam meminimalisir tingkat kemiskinan.

4	Azlan Suhaini	Implementasi program bantuan pangan non tunai Dinas social di kelurahan tuah karya kecamatan tampan kota pekanbaru	2019	Berdasarkan hasil penelitian program bantuan pangan non tunai sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang menerima, walaupun tidak sepenuhnya tidak berubah dalam segi ekonomi masyarakat kecuali mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Dan mampu meringankan beban masyarakat.
5	Ika Surya Kharismawat	Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui Ewarong dikelurahan sidosermo kecamatan wonocolo kota Surabaya	2019	Berdasarkan hasil penelitian program bantuan pangan non tunai sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang menerima, walaupun tidak sepenuhnya tidak berubah dalam segi ekonomi masyarakat kecuali mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Dan mampu meringankan beban masyarakat.



2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dan suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah desa di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis mengambil teori dan model implementasi kebijakan dari George C Edward III disebut dengan Direct and Indirec inpac on Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk mengukur keberhasilan implementasi program BPNT.



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive dan snowball, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya sehingga sedapat mungkin untuk berinteraksi, mengenal kehidupan mereka, dan mengamati/mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual yaitu gambaran tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai oleh Pemerintah Desa Di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang akan menjadi narasumber dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi penelitian. Oleh karena itu, informan haruslah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan memiliki pengalaman dilapangan tentang latar penelitian. Menurut Bagong Sutyanto (2005:172) informan meliputi jenis-jenis sebagai berikut :

1. Informan Kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan memiliki segala macam informasi yang penting yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Informan utama adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan interaksi sosial yang dimaksud.
3. Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan data meskipun ia tidak langsung terlibat dengan komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Informan penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Kepala Desa	1	Informan Kunci
2	Agen Penyalur Bantuan	1	Informan Utama
3	Masyarakat	3	Informan Tambahan

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT oleh pemerintah desa di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.4 Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Menurut (sugiyono, 2009:225) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut (sugiyono 2009:225) data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis atau peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

b. Wawancara

Menurut (Herdiansyah, 2013:27), Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai KPM program BPNT, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat yang mengimplementasikan program BPNT Di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder guna mendukung hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengutip data yang tersedia dari sumber data. Di samping itu, data sekunder juga dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian. Analisis data untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Tujuan dari analisis data yaitu untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji (Kasiram, 2010:119). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014:247). Dalam melakukan reduksi data peneliti merangkum dan mengambil data yang penting dan sesuai dengan topik pembahasan. Data yang tidak sesuai dengan topik pembahasan tidak ikut disertakan karena dianggap tidak penting.

2) Penyajian Data

Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2014:249). Dalam melakukan penyajian data, peneliti menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya sehingga data tersusun. Dengan melakukan penyajian data akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

3) Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2014:252). Dalam menarik kesimpulan peneliti melihat bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan dalam mengumpulkan data, sehingga apabila data mendukung maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun kesimpulan proposal ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa Tukka Dolok adalah suatu desa yang terletak di wilayah kecamatan Pakkat kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun lokasi ini dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian mengingat lokasi ini merupakan tempat tinggal peneliti secara tidak langsung peneliti cukup kenal dengan wilayah ini sehingga di harapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat setempat.

Tabel 3.2
Jadwal Penyelesaian Skripsi

No	Urutan Kegiatan	2022				2023			
		9	10	11	12	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penyusunan Proposal		■						
3	Seminar Proposal			■					
4	Perbaikan Proposal				■				
5	Penelitian					■			
6	Penyusunan Skripsi						■		
7	Seminar Hasil							■	
8	Perbaikan Skripsi								■
9	Sidang Meja Hijau								■
10	Revisi Final Skripsi								■
11	Penyerahan Skripsi Ke Prodi								■

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran dengan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tukka Dolok, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1. Implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tukka Dolok sudah cukup maksimal dalam penerapannya merujuk pada kebijakan pemerintah desa dengan melihat bagaimana komunikasi pemerintah desa terhadap masyarakat dan menunjuk sumber daya manusia atau aparatur desa sebagai agen penyalur bantuan pangan non tunai sudah memiliki karakteristik dan sopan santun yang baik terutama dalam penyaluran bantuan pangan non tunai dengan birokrasi aparatur desa yang cukup relevan disetiap bidangnya dan memiliki tupoksi masing-masing sehingga dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai sudah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat keluarga penerima manfaat (Kpm).
2. Faktor penghambat kebijakan bantuan pangan non tunai memiliki hambatan dalam implementasi kebijakannya dikarenakan sistem pendataan masih kurang maksimal karena adanya kecenderungan pembagian bantuan pangan non tunai secara konteks kekeluargaan terdekat sehingga masyarakat yang

kurang mampu jadi tidak menerima bantuan pangan non tunai akibatnya masyarakat yang seharusnya lebih membutuhkan bantuan tersebut tidak mendapatkannya. Selain itu yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai terdapat sistem pendataan administrasi penduduk yang kurang lengkap termasuk data kependudukan pemerintah Desa Tukka Dolok yang mengakibatkan salah satunya penerima yang telah berpindah keluar kota tetapi masih berstatus keluarga penerima bantuan di Desa Tukka Dolok tidak menerima bantuan tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan disarankan untuk menyusun kebijakan baru sebagai penguatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan penyaluran bantuan pangan non tunai.
2. Disarankan harus adanya tempat khusus penyaluran dan fasilitas umum sebagai pendukung disaat penyaluran bantuan pangan non tunai berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif, Saiful, 2000. Menolak Pembangunanisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup.

Edi Suharto, 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Hessel Nogi Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset.

Herdiansyah, Haris. 2013. Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismet Susila, 2015. Implementasi Dimensi Layanan Public dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV. Budi utama.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.

Musthafa, Walid. 2017. Peran Badan Permusyawaratan dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas Medan Area.

N. Dun, William. 2000. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta: gajah mada Sombaopugowa.wixsite.com/gowa.

Nugroho, Riant. 2017. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo

Sugiono, 2003. Metode penelitian administrasi, Bandung, Cv Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

Sulastomo, 2011. Sistem Jamainan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Wibowo. (2011). "Manajemen Kinerja". Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Ahda Sulukin Nisa, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam" (studi kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi, 2019, Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas islam Negeri Raden intan lampung.

Deliana, Marliana 2020. Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences.

Eko Yudianto Yunus, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019, Volume 9 Nomor 2.

Eko Yudianto Yunus. 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Probolinggo. (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Ika surya kharismawati. 2019. Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui e-warning di kelurahan sidosermo kecamatan wonocolo. (Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum.

Rohana, Tiara dan Mardiyanto. 2019. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. Universitas Sriwijaya.

Rahma D, Anisa Yunisca N., Dan Abdul H. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. Universitas Lampung.

Sumber Peraturan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

**LAMPIRAN 1
PEDOMAN OBSERVASI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN
PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan pemerintah desa dalam kebijakan BPNT yang dilakukan oleh pemerintah desa:

- A. Tujuan :
Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kebijakan bantuan pangan non tunai.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

Instansi :
Nama Program :
Lokasi :
Tanggal :

- B. Aspek yang diamati :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Alamat/lokasi kantor desa			
2	Lingkungan sekitar kantor Desa Tukka Dolok			
3	Fasilitas/unit disekitar kantor Desa Tukka Dolok			
4	Suasana/iklim kehidupan sehari-hari secara sosial			
5	Proses kegiatan apa saja yang ada disekitar kantor Desa Tukka Dolok			
6	Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai			

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN
PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Kepala Desa

Kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sangat diharapkan dalam proposal penelitian ini, karena itu peneliti hanya mengajukan garis besar rencana wawancara yang akan diperdalam saat melakukan wawancara dengan informan.

- A. Tujuan :
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai..
- B. Pertanyaan panduan :
- a. Identitas diri
 - 1) Nama :
 - 2) Jabatan :
 - 3) Agama :
 - 4) Jenis kelamin :
 - 5) Pekerjaan :
 - 6) Alamat :
 - 7) Pendidikan terakhir :
 - b. Pertanyaan penelitian

Komunikasi

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?

Sumber Daya

- 2) Bagaimana sumber daya aparatur dikantor desa tukka dolok terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai?

Disposisi

- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa tukka dolok pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat?

Struktur Birokrasi

- 4) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintahan tersebut?
- 5) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada kpm dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

Agen penyalur BPNT

A. Pertanyaan panduan

- a) Identitas diri
 - 1) Nama :
 - 2) Jabatan :
 - 3) Agama :
 - 4) Jenis kelamin :
 - 5) Pekerjaan :
 - 6) Alamat :
 - 7) Pendidikan terakhir :
- b) Pertanyaan penelitian

Komunikasi

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?

Sumber Daya

- 2) Bagaimana sumber daya aparatur dikantor desa tukka dolok terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai?

Disposisi

- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa tukka dolok pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat?

Struktur Birokrasi

- 4) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintahan tersebut?
- 5) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada kpm dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

Masyarakat

B. Pertanyaan panduan

b) Identitas diri

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Agama :
- 4) Jenis kelamin :
- 5) Pekerjaan :
- 6) Alamat :
- 7) Pendidikan terakhir :

b) Pertanyaan penelitian

Komunikasi

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?

Sumber Daya

- 2) Bagaimana sumber daya aparatur dikantor desa tukka dolok terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai?

Disposisi

- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa tukka dolok pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat?

Struktur Birokrasi

- 4) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintahan tersebut?
- 5) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada kpm dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

Masyarakat

C. Pertanyaan panduan

c) Identitas diri

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Agama :
- 4) Jenis kelamin :
- 5) Pekerjaan :
- 6) Alamat :
- 7) Pendidikan terakhir :

b) Pertanyaan penelitian

Komunikasi

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?

Sumber Daya

- 2) Bagaimana sumber daya aparatur dikantor desa tukka dolok terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai?

Disposisi

- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa tukka dolok pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat?

Struktur Birokrasi

- 4) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintahan tersebut?
- 5) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada kpm dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

Masyarakat

- 6) Pertanyaan panduan
- d) Identitas diri
- 1) Nama :
 - 2) Jabatan :
 - 3) Agama :
 - 4) Jenis kelamin :
 - 5) Pekerjaan :
 - 6) Alamat :
 - 7) Pendidikan terakhir :
- b) Pertanyaan penelitian

Komunikasi

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?

Sumber Daya

- 2) Bagaimana sumber daya aparatur dikantor desa tukka dolok terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai?

Disposisi

- 3) Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor desa tukka dolok pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai kepada masyarakat?

Struktur Birokrasi

- 4) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintahan tersebut?
- 5) Apakah pelaksanaan kebijakan bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada kpm dapat meningkatkan kesejahteraan desa?

LAMPIRAN 3
HASIL OBSERVASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN
PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Dalam pengamatan (observasi) yang di lakukan adalah mengamati keadaan pemerintah desa dalam kebijakan BPNT yang dilakukan oleh pemerintah desa:

A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kebijakan bantuan pangan non tunai.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

Instansi : Kantor Kepala Desa
Nama Program : Bantuan Pangan Non Tunai
Lokasi : Desa Tukka Dolok
Tanggal : 20 Desember 2022

B. Aspek yang diamati :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Alamat/lokasi kantor desa	✓		
2	Lingkungan sekitar kantor Desa Tukka Dolok	✓		Ada
3	Fasilitas/unit disekitar kantor Desa Tukka Dolok	✓		Ada
4	Suasana/iklim kehidupan sehari-hari secara sosial	✓		Ada
5	Proses kegiatan apa saja yang ada disekitar kantor Desa Tukka Dolok	✓		Ada
6	Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan pangan non tunai	✓		Ada

LAMPIRAN 4
HASIL WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH
PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN PAKKAT
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

A. Identitas Responden

1. N a m a : Sumartono Pardosi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?
”saya rasa dengan adanya kebijakan pemerintah ini masyarakat berpenghasilan rendah dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan bagi keluarga, dan saya sangat perihatin terhadap masyarakat yang belum bisa mendapatkan program ini dikarenakan ketidkda ingin tauan masyarakat atas program pemerintah ini melakukan komunikasi pada masyarakat dengan cara penyampaian berita tertulis contohnya melakukan surat edaran yang ditempelkan ditempat umum seperti ditiang listrik maupun diwarung sekitar desa dimana dalam berita tertulis tersebut sudah tercantum penerima bantuan pangan non tunai
2. Bagaimana sumber daya aparatur dikantor Desa Tukka Dolok terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai?
“selama penyaluran bpnt kepada masyarakat saya rasa aparatur desa atau perangkat desa telah cukup membantu dalam penyaluranya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu susah dalam pengambilan bantuan pangan non tunai (bpnt).”
3. Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor Desa Tukka Dolok pada saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat?
“Selama penyaluran bpnt keada masyarakat cukup baik masyarkat di atur dan di arahkan dengan sedemikian mudah saat memberikan,bantuan dan sikap agen penyalur cukup sabar dalam menghadapi seluruh masyarakat penerima bantuan pangan non tunai (BPNT)
4. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintah tersebut ?
“berbicara mengenai bagaimana birokrasi dalam penyaluran bpnt sudah sesuai prosedur pemerintah desa tukka dolok dimana melalui inturuksi dari kepala desa dan di turunkan ke agen penyalur bpnt dan sudah disediakan tempat kumpul dalam pembagian bpnt dan memiliki antiran no sehingga menjaga ketertiban masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : Tiurma Marpaung
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?
”pada saat pembagian sembako masyarakat yang mendapat bantuan akan mengambil nomor antrian dulu lalu saya akan bertanya pada masyarakat penerima bantuan apa yang diinginkan atau diperlukan secarasesuaian dengan kebutuhan penerima sehingga agen penyalur akan mengarahkannya terutama saya pribadi
2. Bagaimana sumber daya aparatur dikantor Desa Tukka Dolok terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai?
Pertama saya tau program ini dari kepala desa yang mendata masyarakat di lingkungan ini yang memiliki pendapatan dibawah dan aparatur desa datang kerumah dan memberikan informasi apa saja yang berkas yang harus diisi agar bisa mendapat bantuan pangan non tunai”
3. Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor Desa Tukka Dolok pada saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat?
“harapan saya semoga bantuan seperti ini ada terus dan berlanjut agar orang-orang yang pendapatan keluarganya yang kurang mampu agar bisa mendapat bantuan ini
4. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintah tersebut ?
“berbicara mengenai bagaimana birokrasi dalam penyaluran bpnt sudah sesuai prosedur pemerintah desa tukka dolok dimana melalui inturuksi dari kepala desa dan di turunkan ke agen penyalur bpnt dan sudah disediakan tempat kumpul dan saya sebagai agen penyalur bantuan akan memberikan nomor antrian kepada penerima bantuan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat penerimaan bantuan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : Rosmawani Lubis
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SLTP/Sederajat

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?
”pada saat pembagian sembako masyarakat yang mendapat bantuan akan mengambil nomor antrian dulu lalu saya akan bertanya pada masyarakat penerima bantuan apa yang diinginkan atau diperlukan secarasesuaian dengan kebutuhan penerima sehingga agen penyalur akan mengarahkannya terutama saya pribadi
2. Bagaimana sumber daya aparatur dikantor Desa Tukka Dolok terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai?
Pertama saya tau program ini dari kepala desa yang mendata masyarakat di lingkungan ini yang memiliki pendapatan dibawah dan aparatur desa datang kerumah dan memberikan informasi apa saja yang berkas yang harus diisi agar bisa mendapat bantuan pangan non tunai”
3. Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor Desa Tukka Dolok pada saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat?
“harapan saya semoga bantuan seperti ini ada terus dan berlanjut agar orang-orang yang pendapatan keluarganya yang kurang mampu agar bisa mendapat bantuan ini
4. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintah tersebut ?
“berbicara mengenai bagaimana birokrasi dalam penyaluran bpnt sudah sesuai prosedur pemerintah desa tukka dolok dimana melalui inturuksi dari kepala desa dan di turunkan ke agen penyalur bpnt dan sudah disediakan tempat kumpul dan saya sebagai agen penyalur bantuan akan memberikan nomor antrian kepada penerima bantuan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat penerimaan bantuan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : Herniati Sigalingging
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?
”pada saat pembagian sembako masyarakat yang mendapat bantuan akan mengambil nomor antrian dulu lalu saya akan bertanya pada masyarakat penerima bantuan apa yang diinginkan atau diperlukan secarasesuaian dengan kebutuhan penerima sehingga agen penyalur akan mengarahkannya terutama saya pribadi
2. Bagaimana sumber daya aparatur dikantor Desa Tukka Dolok terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai?
Pertama saya tau program ini dari kepala desa yang mendata masyarakat di lingkungan ini yang memiliki pendapatan dibawah dan aparatur desa datang kerumah dan memberikan informasi apa saja yang berkas yang harus diisi agar bisa mendapat bantuan pangan non tunai”
3. Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor Desa Tukka Dolok pada saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat?
“harapan saya semoga bantuan seperti ini ada terus dan berlanjut agar orang-orang yang pendapatan keluarganya yang kurang mampu agar bisa mendapat bantuan ini
4. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintah tersebut ?
“berbicara mengenai bagaimana birokrasi dalam penyaluran bpnt sudah sesuai prosedur pemerintah desa tukka dolok dimana melalui inturuksi dari kepala desa dan di turunkan ke agen penyalur bpnt dan sudah disediakan tempat kumpul dan saya sebagai agen penyalur bantuan akan memberikan nomor antrian kepada penerima bantuan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat penerimaan bantuan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA TUKKA DOLOK KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

A. Identitas Responden

1. N a m a : Ririn Sigalingging
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Petani
5. Pendidikan : SLTP/Sederajat

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada masyarakat?
”pada saat pembagian sembako masyarakat yang mendapat bantuan akan mengambil nomor antrian dulu lalu saya akan bertanya pada masyarakat penerima bantuan apa yang diinginkan atau diperlukan secarasesuaian dengan kebutuhan penerima sehingga agen penyalur akan mengarahkannya terutama saya pribadi
2. Bagaimana sumber daya aparatur dikantor Desa Tukka Dolok terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai?
Pertama saya tau program ini dari kepala desa yang mendata masyarakat di lingkungan ini yang memiliki pendapatan dibawah dan aparatur desa datang kerumah dan memberikan informasi apa saja yang berkas yang harus diisi agar bisa mendapat bantuan pangan non tunai”
3. Bagaimana karakter atau watak aparatur kantor Desa Tukka Dolok pada saat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat?
“harapan saya semoga bantuan seperti ini ada terus dan berlanjut agar orang-orang yang pendapatan keluarganya yang kurang mampu agar bisa mendapat bantuan ini
4. Bagaimana struktur birokrasi yang ada di instansi pemerintah tersebut ?
“berbicara mengenai bagaimana birokrasi dalam penyaluran bpnt sudah sesuai prosedur pemerintah desa tukka dolok dimana melalui inturuksi dari kepala desa dan di turunkan ke agen penyalur bpnt dan sudah disediakan tempat kumpul dan saya sebagai agen penyalur bantuan akan memberikan nomor antrian kepada penerima bantuan agar tidak terjadi kerusuhan pada saat penerimaan bantuan

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Wawancara Bersama Kepala Desa Tukka Dolok Sebagai informan kunci. (Bapak Sumartono Pardosi)



Wawancara Bersama Agen Penyalur Bantuan Sebagai informan utama. (Ibu Tiurma Marpaung)



Wawancara Bersama Masyarakat Sebagai informan tambahan.



Ibu Rosmawani Lubis



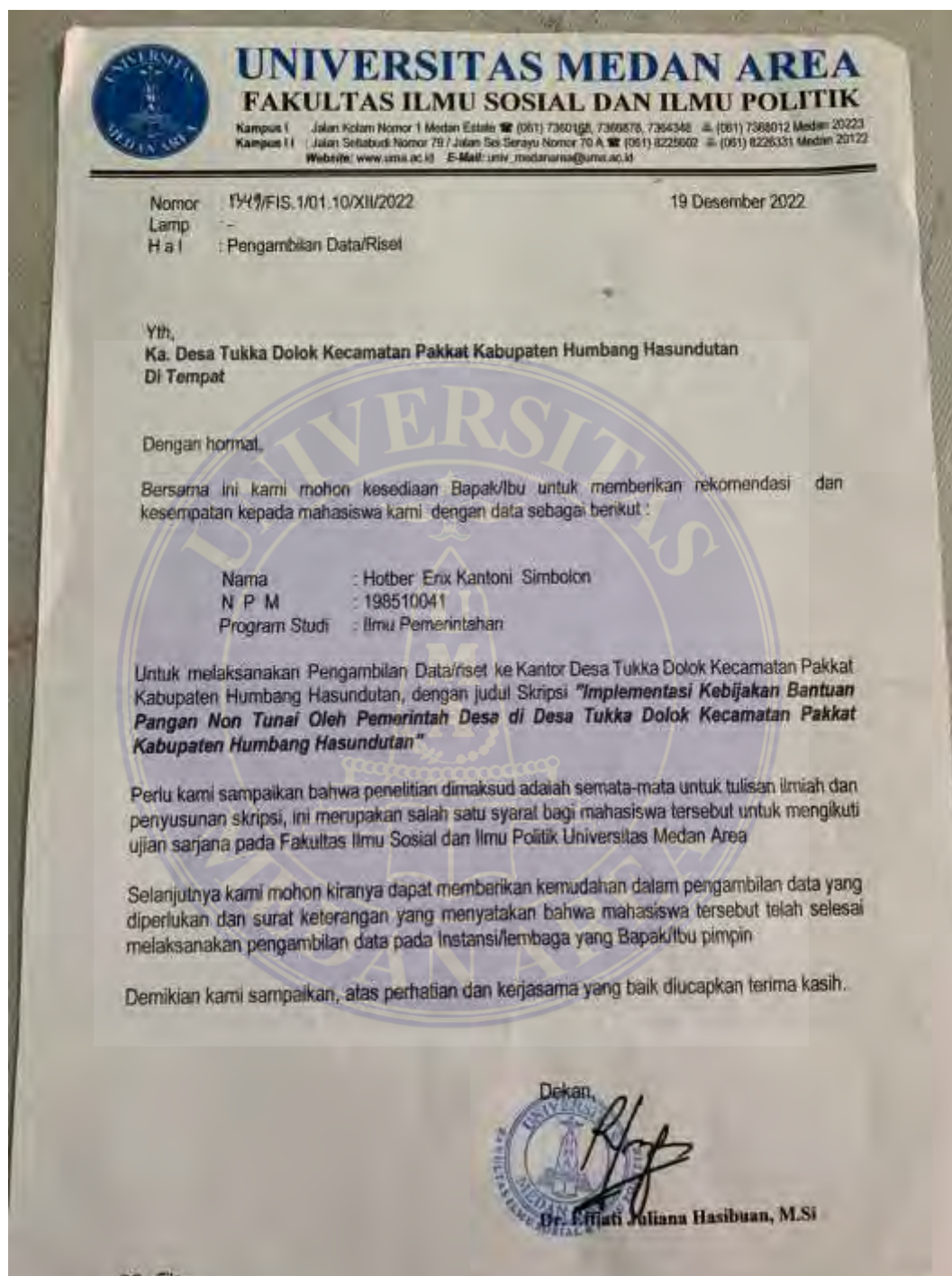
Ibu Ririn Sigalingging



Ibu Herniati Sihotang

Lampiran 6

Surat Riset Lapangan



Lampiran 7

Surat Balasan Kantor Desa

